



ADDRESSING THE FINANCIAL REPORTING FRAUD: A RATIONAL CHOICE THEORY
PERSPECTIVE

Yudha Pramana¹, Anis W. Hermawan²

¹Faculty of Economics, Udayana University, Denpasar, Indonesia E-mail: yudhapramana97@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia. E-mail: aniswahyu524@gmail.com

Abstrak

Skandal pelaporan keuangan masih terjadi, termasuk pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek, sekalipun telah terdapat hal-hal yang menguntungkan manajemen, seperti gaji, tunjangan, dan bonus yang cukup besar dan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan public yang bereputasi secara periodic. Perlu melakukan penanganan kecurangan pelaporan keuangan berdasarkan perspektif ilmu social. Berdasarkan teori rational choice institutionalism, penanganan kecurangan pelaporan keuangan yang pada dasarnya terdiri dari insentif atau tekanan atau motif, sikap, dan kesempatan, memadai dilakukan dengan memetakan perilaku dan kepentingan-kepentingan yang rasional terhadap para actor atau agen dalam korporasi, menerapkan kontinuitas korporasi melalui preferensi tetap dan institusi yang stabil, dan mampu menjelaskan determinisme ekonomi.

Keywords: Fraud, Rational Choice, Income Statement

A. Latar Belakang

Masih banyak terjadi skandal kecurangan laporan keuangan baik secara internasional maupun nasional, termasuk di bursa efek. Beberapa kasus kecurangan laporan keuangan secara internasional dapat dilihat dari beberapa entitas, misalnya di Amerika Serikat, antara lain dilakukan Enron yang menyebabkan investor, pekerja, dan pemegang saham rugi sebesar US\$74 milyar, Waste Management yang salah melaporkan penghasilannya sebesar US\$1.7 milyar, WorldCom yang melakukan *mark up* asset sebesar US\$11 milyar, Lehman Brothers yang menyamakan pinjaman sebagai penghasilan sebesar US\$50 milyar (Tuanakotta, 2013), dan kasus Mike Perry, Chief Executive Officer (CEO) IndyMac, yang memiliki gaji tahunan sebesar US\$1 juta namun insentifnya (bonus dan *stock options*) sangat tinggi dimana Perry memperoleh lebih dari US\$32 juta atas penjualan saham IndyMac dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 (Martin, 2011).

Masih maraknya kecurangan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek ini telah menimbulkan beberapa pemikiran dan kajian. Studi Martin (2011) terhadap industry real estate menegaskan bahwa seringkali tindakan kecurangan tidak lain disebabkan kuatnya ketidaketisan para pihak yang terlibat (*unethical people*) yang dilakukan melalui penipuan (*deception*). Martin menjabarkan *deception* sebagai suatu hal yang riil dan diharapkan manusia dalam merespon insentif yang tidak terkontrol dan konflik kepentingan yang ada. Studi Chen (2016) terhadap

beberapa perusahaan asing yang terdaftar di bursa efek Amerika Serikat mengungkapkan modus perusahaan tersebut, seperti Royal Ahold Corporation (perusahaan Belanda) yang secara material melakukan salah saji hasil dan kinerja keuangannya, Nortel Networks Corporation (perusahaan Kanada) yang menggelembungkan permintaan produk dan penjualannya, dan Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. (perusahaan Belgia) yang melakukan pelaporan keuangan yang salah. Selanjutnya, studi Gunduz dan Onder (2013) menemukan bahwa kecurangan korporasi, seperti korupsi dan penyuapan yang mulai menghangat sejak akhir tahun 1990-an, banyak terjadi di dunia pemerintahan, konstruksi, organisasi, dan individu, sehingga perlu memerangi kecurangan dengan membangun perilaku bisnis yang jujur, transparan, dan *fair*.

Masih banyaknya terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan untuk tujuan tertentu dan studi yang ada masih dari perspektif akuntansi dan hukum, maka perlu melakukan kajian literature dari perspektif ilmu social. Urgensi ilmu social didasarkan pada kenyataannya, totalitas disusun untuk memastikan posisi dan rorientasi masyarakat untuk melayani beberapa fungsi sistem, yakni melalui suatu paket hak dan kewajiban yang dengan cara tertentu terkait dengan masing-masing posisi, dan alokasi orang dan hal-hal untuk berbagai posisi membutuhkan setiap hasil yang diterima oleh peserta komunitas yang lebih luas, baik secara langsung atau lebih khas, melalui perwakilan proxy (Lawson, 2019). Sehingga perlu menjawab rumusan permasalahan yang menanyakan “bagaimana penanganan kecurangan pelaporan keuangan berdasarkan perspektif teori pilihan rasional?”.

B. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data, dengan cara mencatat dan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang relevan dengan penelitian, yang data sekundernya dikumpulkan bukan dari sumber langsung. Adapun literatur yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan situs resmi yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari data sekunder berupa kecurangan laporan keuangan dan elemen *fraud triangle* yaitu motif/tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

C. Analisis dan Pembahasan

a. Gambaran Umum Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan Korporasi

Soltani (2014) telah melakukan analisis terhadap kegagalan 3 (tiga) perusahaan Amerika Serikat (Enron, WorldCom, dan HealthSouth) dan 3 (tiga) perusahaan Eropa, (Royal Ahold, Parmalat, dan Vivendi Debacle). Studi Soltani (2014) menemukan pada keenam perusahaan tersebut, berupa: (a) kesamaan sebagai perusahaan yang memiliki profil penyimpangan berat berupa akuntabilitas, mekanisme internal control yang tidak memadai, dan struktur tata kelola yang tidak efektif, (b) kegagalan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menjaga independensitasnya sehingga menghasilkan kualitas audit laporan keuangan yang tidak bagus, (c) dilemma etika yang terkait dengan dewan yang tidak efektif, tata kelola

dan mekanisme control yang tidak efisien, skema insentif yang terdistorsi, ketidakteraturan akuntansi, kegagalan auditor, dominasi CEO, perilaku manajemen yang disfungsi dan ketidaktegasan kode etik terhadap manajemen puncak, dan (d) kesamaan tujuan berdasarkan analisis yang dilakukan dari perspektif fraud triangle.

Laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak seperti, pihak regulator, (calon) investor, kreditur, supplier, pelanggan, dan pihak lainnya untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pengambilan keputusan. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban para pihak yang terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan suatu perusahaan, terutama yang terdaftar di bursa efek, perlu untuk memahami teori kecurangan. Beragam pengertian kecurangan telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Martin (2011) mendefinisikan kecurangan sebagai suatu niat untuk menipu pihak lain dengan salah menyajikan suatu fakta sehingga terjadi kerugian akibat tindakan penipuan tersebut. kemudian, Golden *et al.* (2011) memaknai kecurangan sebagai suatu perbuatan berupa penyajian suatu materi yang salah dengan meyakinkan, yang menyebabkan kerugian finansial atas terjadinya perbuatan tersebut. selanjutnya, Brennan dan McGrath (2007) menggambarkan kecurangan sebagai suatu aktivitas yang pada umumnya dilakukan secara tersembunyi.

Kecurangan yang terjadi pada korporasi tidak dapat terlepas dari 3 faktor utama, sebagaimana Donald Cressey (Martin, 2011; Golden *et al.*, 2011; Cendrowski dan Martin, 2007) mengemukakannya sebagai fraud triangle, yang terdiri dari motive atau pressure, rationalization, dan opportunity. Salah satu akibat timbulnya kecurangan adalah kerugian finansial, sehingga adanya kasus-kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek menimbulkan pertanyaan akan tingkat kepercayaan terhadap pelaporan keuangan yang terlibat dalam skandal kecurangan tersebut yang terkesan seolah-olah telah memenuhi 4 (empat) karakteristik kualitatif, yakni understandable, relevant, reliable, dan comparable (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014).

Adanya skema dan tipikal khusus kecurangan laporan keuangan tersebut menunjukkan adanya relasi yang erat antara kecurangan pelaporan keuangan dengan fraud triangle sebagaimana panduan American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) dan Statement on Auditing Standards (SAS) Nomor 99 merincikannya terdiri dari insentif atau tekanan atau motif, sikap, dan kesempatan (Cendrowski dan Martin, 2007). Motif melakukan laporan keuangan yang tidak benar mengacu pada adanya insentif atau tekanan ketika adanya upaya untuk memanipulasi hasil/kinerja demi untuk mendapatkan *reward*, sehingga perusahaan harus mewaspadai program kompensasi yang berhubungan dengan *reward* yang sangat besar terhadap pencapaian target tertentu, yang justru dapat mendistorsi keuangan perusahaan (Cendrowski dan Martin, 2007). Sikap berhubungan dengan sikap individu dalam perusahaan terhadap laporan keuangan yang akurat, yang menuntun mereka untuk memanipulasi laporan keuangan melalui beberapa teknik termasuk mempengaruhi management judgement, seperti melakukan perubahan estimasi atau cadangan tertentu, menunda pengakuan biaya, dan mempercepat pengakuan penghasilan (Cendrowski dan Martin, 2007). Sedangkan, kesempatan untuk mendistorsi laporan keuangan perlu diwaspadai dari upaya mencurangi asset-aset dengan memanipulasi system akuntansi dalam mencapai suatu target tertentu (Cendrowski dan Martin, 2007).

b. Teori Pilihan Rasional

Sohail dan Cavill (2008) mengungkapkan bahwa tantangan kecurangan pelaporan keuangan cukup signifikan, termasuk pada industri konstruksi yang meliputi praktik penyuaipan, penggelapan uang, dan penipuan, yang dapat terjadi pada setiap tahap proyek konstruksi. Diperlukan strategi yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi, penguatan institusi profesional, pencegahan, dan monitoring melalui penggunaan teori pilihan rasional.

Meskipun rasionalitas didefinisikan secara beragam, namun rasionalitas dapat dikatakan berkaitan dengan perhitungan, ketertarikan pada diri, sebuah sikap kritis atau sebagai ketaatan terhadap aturan. Fokus pada teori pilihan rasional adalah pada para pelaku, tidak berkaitan dengan apa yang menjadi pilihan-pilihan tersebut atau sumber-sumber mereka (Wirawan, 2012). Para pelaku sering dipandang sebagai entitas yang memiliki tujuan/maksud, yang berarti bahwa para pelaku memiliki batas akhir atau tujuan dari tindakan-tindakan mereka. Para pelaku juga memiliki pilihan/preferensi (atau nilai-nilai, kegunaan) (Wirawan, 2012).

Teori pilihan rasional dengan segala kelebihan dan kelemahannya masih cukup prospektif di berbagai area disiplin ilmu social (Haryanto, 2012). Teori pilihan rasional pertama sekali dikemukakan oleh Coleman dengan menyatakan bahwa teori tersebut merupakan sebuah bentuk dari analisis untung-rugi, berdasarkan asumsi bahwa orang membuat keputusan dengan berbasis hasil atau ganjaran dalam bentuk tertentu. Bila dihadapkan pada keputusan yang sulit, mereka membuat kompromi antara kerugian dan keuntungan, misalnya, pada saat membeli mobil atau ketika memilih partai politik yang akan menaikkan pajak tapi juga menaikkan anggaran belanja untuk kesejahteraan masyarakat lebih banyak dari partai lawannya (Burke, 2005).

Selanjutnya, teori pilihan rasional berkembang menjadi rational choice institutionalism. Teori ini muncul dari kebutuhan untuk membawa institusi kembali sebagai cara untuk menjelaskan hasil yang selama ini tidak dapat dijelaskan oleh teori universal tindakan rasional. Schmidt (2009) mengemukakan beberapa proposisi yang terdapat dalam rational choice institutionalism ini, yaitu objek penjelasannya adalah terhadap perilaku yang rasional dan kepentingan-kepentingan yang rasional, logika penjelasan adalah kalkulasi, kemampuan untuk menjelaskan perubahan adalah kontinuitas melalui preferensi tetap dan institusi yang stabil, sedangkan permasalahan-permasalahan penjelasannya terletak pada determinisme ekonomi.

Hampir semua teori ekonomi yang berkembang saat ini menggunakan asumsi-asumsi dari pilihan rasional. Dalam teori ini, setiap individu diasumsikan mengevaluasi biaya dan imbalan dari seluruh aktivitas potensial dan oleh karena itu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan dan preferensi utamanya (Haryanto, 2012). Begitu halnya dalam pelaporan keuangan korporasi, teori pilihan rasional akan memadai untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan korporasi berkenaan dengan timbulnya kerugian keuangan yang sangat besar, dan adanya upaya pihak tertentu untuk memanfaatkan kompleksitas permasalahan pada korporasi untuk melakukan perbuatan curang. Misalnya, dalam hal bonus ataupun insentif yang sangat besar, Golden *et al.* (2011) menyatakan bahwa hal tersebut dapat memicu ketamakan ataupun ketakutan kehilangan jabatan/posisi para eksekutif perusahaan tersebut, sebagaimana potensi manipulasi kompensasi eksekutif dibandingkan menjadi penyeimbang untuk meningkatkan kepentingan jangka panjang para investor pernah terjadi ketika periode *tech bubble* terjadi sekitar tahun 1995-2000 (Giroux, 2015).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan bahwa faktor ketiga terjadinya sebuah fraud adalah rasionalisasi. Pendeteksian kecurangan dalam

laporan keuangan dengan mempergunakan konsep actor yang memiliki pilihan/preferensi telah banyak dikembangkan dalam berbagai studi. Hasil penelitian Widarti (2015) menunjukkan bahwa *financial stability*, *external pressure*, dan *financial targets* mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hasil studi Wahyuni dan Budiwitjaksono (2017) menunjukkan bahwa *razionalization* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan *financial stability* yang, *external pressure*, *financial targets*, *nature of industry*, *ineffective monitoring* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Adanya beberapa studi terhadap kecurangan pelaporan keuangan tersebut menunjukkan benang merah berupa rasionalisasi, dimana rasionalisasi merupakan elemen penting dalam *fraud*.

Rasionalisasi telah menjadi sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan, secara tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada (Spillane, 2003). Penjelasan tersebut menunjukkan rasionalisasi merupakan tindakan yang dapat merugikan suatu badan usaha. Bagi para pelakunya alasan yang digunakan untuk menutupi suatu kecurangan merupakan hal yang biasa. Secara langsung para pemangku kepentingan dapat menelusuri secara langsung terjadinya fraud pada pelaporan keuangan dengan mengimplementasikan teori *rational choice institutionalism*, yang proposisi-proposisinya adalah:

1) Perilaku yang rasional dan kepentingan-kepentingan yang rasional

Cara berasionalisasi yang sering terjadi adalah memindahkan kebenaran dasar sejajar dengan prestasi yang tidak tepat, namun sebaliknya rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan penghargaan diri yang palsu. Para pakar sosiolog merujuk pada proses di mana peningkatan jumlah tindakan sosial menjadi berdasarkan pertimbangan efisiensi perhitungan bukan pada motivasi yang berasal dari moralitas, emosi, kebiasaan atau tradisi. Beberapa alasan rasionalisasi yang biasa digunakan seseorang (Albercht et al., 2011; Dellaportas, 2013) dalam melakukan kecurangan adalah organisasi berhutang pada saya, saya hanya meminjam uang tersebut, nanti akan saya kembalikan, tidak ada pihak yang dirugikan, saya memiliki hak yang lebih besar, kita akan memperbaiki keuangan selama kita hanya mendapatkan masalah, ini untuk tujuan yang baik, semua memperoleh kekayaan, mengapa saya tidak, perusahaan memperbolehkan hal ini, ini bukanlah masalah yang serius, di sini tidak terdapat internal control yang kuat jadi saya ingin menunjukkan pada mereka bahwa ini dapat mudah dilakukan, saya ingin meningkatkan taraf hidup saya, mereka tidak memperlakukan saya dengan hormat, jadi saya ingin memperolehnya.

2) Kontinuitas melalui preferensi tetap dan institusi yang stabil

Dalam menjaga keberlangsungan korporasi, pemegang saham dan pemangku kepentingan harus membuat preferensi yang tetap dan stabil terhadap korporasi. Korporasi harus membangun, mengoperasikan, dan mempertahankan kualitas dan kuantitas secara memadai, akuntabel, dan berkelanjutan. Misalnya, tingkat kesejahteraan para actor atau agen dalam korporasi harus disesuaikan dengan kinerja yang telah ditargetkan oleh korporasi.

3) Determinisme ekonomi

Determinisme ekonomi merupakan filosofi yang menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi pada akhirnya adalah determinan perubahan social dan politik (Cerdasco, 2019). Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam meminimalisir kecurangan pelaporan keuangan, stakeholders yang berkepentingan, terutama para pemegang saham, harus menggunakan sarana yang dimilikinya untuk mengontrol para agen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, metode, analisis, dan pembahasan, disimpulkan bahwa penanganan kecurangan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan teori rational choice institutionalism. Kecurangan pelaporan keuangan yang pada dasarnya terdiri dari insentif atau tekanan atau motif, sikap, dan kesempatan, dapat diminimalisir dengan memetakan perilaku dan kepentingan-kepentingan yang rasional terhadap para actor atau agen dalam korporasi, menerapkan kontinuitas korporasi melalui preferensi tetap dan institusi yang stabil, dan mampu menjelaskan determinisme ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brennan, N.M. dan McGrath, M. (2007) 'Financial Statement Fraud: Some Lessons from US and European Case Studies', *Australian Accounting Review*, Vol. 17, No. 2, hal. 49-61.
- Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*, Alih Bahasa Mestika Zed *et al.*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Cendrowski, H., dan Martin, J. (2007) 'The Fraud Triangle', dalam Cendrowski, H., Martin, J.P. dan Petro, L.W. (ed.) *The Handbook of Fraud Deterrence*, John Wiley & Sons, New Jersey.
- Cerdasco, Determinisme ekonomi, 2019, available at <https://cerdasco.com/determinisme-ekonomi/>, accessed on December 1, 2022.
- Chen, L. (2016) 'Local Institutions, Audit Quality, and Corporate Scandals of US-Listed Foreign Firms', *Journal of Business Ethics*, Vol. 133, No. 2, hal. 351-373.
- Giroux, G. 2015. *Executive Compensation: Accounting and Economic Issues*. Business Expert Precc, LLC, New York.
- Golden, T.W., *et al.* 2011. *A Guide to Forensic Accounting Investigation*. John Wiley & Sons, New Jersey.
- Gunduz, M. dan Onder, O. (2013) 'Corruption and Internal Fraud in the Turkish Construction Industry', *Science Engineering Ethics*, Vol. 19, hal. 505-528.
- Haryanto, Sindung, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*, Sleman: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Lawson, Tony, *The Nature of Social Reality: Issues in Social Ontology*, Oxon and New York: Routledge, 2019.
- Martin, V. 2011. *Fraud Prevention for Commercial Real Estate Valuation*. Appraisal Institute, Chicago.

- Schmidt, Vivien A. 2009. "Comparative Institutional Analysis." In Handbook of Comparative Politics eds., Todd Landman and Neil Robinson. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Soltani, B. (2014) 'The Anatomy of Corporate Fraud: A Comparative Analysis of High Profile American and European Corporate Scandals', *Journal of Business Ethics*, Vol. 120, No. 2, hal. 251-274.
- Sohail, M., & Cavill, S. (2008) 'Accountability to prevent corruption in construction projects', *Journal of Construction Engineering & Management*, 134(9), 729-738.
- Tuanakotta, T.M. 2013. *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Wirawan, I. B., *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.